

**PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN OBYEK
WISATA GOA PINDUL**
(Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh

Habib Nurohman
NIM.10401244031

**JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**PENYELESAIAN KONFLIK PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA
PINDUL
(Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun
2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan)**

Oleh: Habib Nurohman dan Dr.Suharno, M.Si
Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FIS UNY
habibnurohman31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan analisis data induktif, meliputi 3 (tiga) tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan merupakan salah satu solusi dan mampu meredam konflik pengelolaan Goa Pindul melalui upaya: memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berwenang mengelola Obyek wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Nomor: 016A/KPTD/2015; memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha pariwisata untuk mengelola usahanya dengan tidak mengabaikan kewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif atau melalui kerjasama. (2) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik adalah terlambatnya kehadiran pemerintah daerah dalam mengundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai regulasi kebijakan mengakibatkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataaan Kabupaten Gunungkidul dan Pemerintah Desa Bejiharjo terbatas dalam mengambil tindakan karena tidak ada payung hukum saat terjadinya konflik, sehingga konflik melibatkan banyak pihak yang berakibat pada sulitnya para pihak untuk mencapai kesepakatan sehingga konflik berlarut-larut

Kata Kunci: *Penyelesaian konflik, Goa Pindul, Penyelenggaraan Kepariwisataaan*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul saat ini giat dalam pembangunan pariwisata. Desa yang saat ini mencolok dalam pembangunan Desa Wisatanya adalah Desa Bejiharjo, Desa Bejiharjo merupakan pemenang utama anugerah Desa Wisata Terbaik Nasional tahun 2012 yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan mengoptimalkan penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata yang diterima Desa Bejiharjo. Desa Bejiharjo juga dijadikan sebagai model gugusan Desa Wisata-Desa Terkait, yaitu model pengembangan pariwisata yang menempatkan Desa Bejiharjo sebagai pusat pengembangan dan desa-desa beserta masyarakat di sekitarnya sebagai pendukung sekaligus penerima manfaatnya (Subandon Agus, dkk, 2013: 3).

Pengelolaan Desa Wisata Goa Pindul berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul juga menjadi percontohan pengelolaan kepariwisataan bagi negara anggota ASEAN. Perwakilan negara-negara ASEAN akan belajar pengelolaan wisata melalui pemberdayaan masyarakat yang selanjutnya akan diterapkan di negara masing-masing. Mendunianya keberadaan Goa Pindul tentu menjadi harapan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Keberhasilan masyarakat melalui kelompok sadar wisata dianggap telah mampu memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan wisata Goa Pindul dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Usaha para Pokdarwis ini merupakan prestasi luar biasa, mengingat desa Bejiharjo terletak di Kabupaten Gunungkidul yang selama ini mendapat stigma negatif, sebagai daerah berpenduduk miskin terbanyak di Provinsi DIY (Subando Agus, dkk, 2013: 3). Kesuksesan pengelolaan Goa Pindul telah berhasil menggeser angka kemiskinan masyarakat Gunungkidul, mengurangi pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga apabila dulu banyak pemuda yang hobi “nongkrong” dan mabuk-mabukan, sekarang sudah tidak ada lagi karena pemuda banyak dilibatkan dalam pengelolaan Goa Pindul.

Di balik angka fantastis keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan Goa Pindul maupun manfaat yang banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah sendiri dalam meningkatkan pendapatan daerah, terdapat pihak yang merasa dirugikan dan tidak merasakan hasil atas pengelolaan Goa Pindul. Atiek Damayanti, seorang warga yang mengklaim bahwa Goa Pindul berada di bawah tanah miliknya yang terdapat goa dan sungai di bawah tanah. Atiek Damayanti mengantongi bukti dokumen negara berupa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01335 Bejiharjo dan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 01336. Menurut Atiek, dialah merasa sebagai orang yang berhak untuk menggunakan ruang bawah tanah dan air tanah/sungai bawah tanah di bawah tanah miliknya.

Pemerintah daerah belum merespon secara cepat konflik yang muncul dalam masyarakat, sehingga berakibat pada konflik yang berkepanjangan. Pemerintah daerah terlambat dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan sebagai payung hukum pengelolaan suatu obyek wisata dan terlambat membaca situasi masyarakat, sumber daya di lingkungan sekitar masyarakat bersangkutan, dan kebutuhan masyarakat.

Saat konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul memuncak, pemerintah daerah baru merespon dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang diharapkan akan mampu mengatasi konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul. Regulasi tersebut berperan besar dalam menentukan kewenangan pihak yang berhak mengelola, menyediakan sarana dan prasarana, promosi pariwisata, dan siapa yang berkewajiban untuk membayar pajak. Jika hak untuk mendapatkan pemasukan, menyiapkan sarana dan prasarana, promosi pariwisata, kewajiban membayar pajak sudah ditetapkan, pengelolaan tersebut bisa terstruktur dan tidak liar. Kebijakan tersebut merupakan landasan untuk melaksanakan pengelolaan pariwisata.

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul diharapkan bisa terselesaikan setelah keluarnya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Pengelolaan obyek wisata Goa Pindul juga diharapkan mampu memberikan pemasukan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Gunungkidul. Bupati Gunungkidul juga mengeluarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai Pengelola Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi Kawasan Goa Pindul. Melalui keputusan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul dan mampu menciptakan ketertiban dan keamanan kawasan wisata.

Adanya konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul antara perseorangan yang mengklaim bahwa Goa Pindul berada di bawah tanah kepemilikannya dengan kelompok pengelola pariwisata yang membutuhkan peran pemerintah daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah “Apakah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 mampu menyelesaikan konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul?” Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan melakukan analisis tentang “Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul (Tinjauan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata).”

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Konflik

1. Pengertian Konflik

Menurut Suharno (2011: 14-15) konflik adalah situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat yang kacau atau tidak adanya ketertiban, saling klaim antar pihak, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik. Dapat dikatakan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia setidaknya pernah mengalami konflik

dalam hubungan sosial dengan manusia lain. Konflik mengandung pengertian “benturan” seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok, dan antara kelompok atau individu dengan pemerintah (Ramlan Surbakti, 1992: 149).

Dengan demikian, secara sederhana dapat dipahami bahwa konflik terjadi dalam sebuah peristiwa yang timbul akibat ledakan emosi dari masing-masing individu atau kelompok atau akibat dari rasa solidaritas yang tinggi dan kekecewaan atas keharmonisan yang dulu dirasakan sudah tidak dapat rasakan lagi. Di sisi lain, konflik juga mempunyai sisi yang baik, konflik adalah unsur penting bagi integrasi sosial. Selama ini konflik selalu dipandang sebagai faktor negatif yang memecah belah. Konflik sosial dalam beberapa cara memberikan keutamaan pada kelompok serta mempererat hubungan interpersonal (Suharno, 2011: 14).

2. Faktor Penyebab Konflik

Menurut Suporahardjo (Yumi, dkk, 2012: 9), ada beberapa penyebab atau sumber konflik. Sumber konflik adalah adanya perbedaan dan perbedaan tersebut bersifat mutlak, yang artinya secara obyektif memang berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi pada tataran antara lain: (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3) perbedaan tata nilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan pengakuan hak kepemilikan (klaim).

4. Bentuk-bentuk Konflik

Menurut Ralf Dahrendorf dalam I Nyoman Ngurah Subagia Negara (2005: 31) bentuk-bentuk konflik terdiri dari:

a. Konflik Politik

Dalam konflik politik ada beberapa ciri yang dapat dilihat diantaranya:

- 1) Setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan yang terdapat dimana-mana;

- 2) Setiap unsur dalam masyarakat memberikan kontribusi terhadap disintegrasi dan perubahan;
- 3) Setiap masyarakat dicirikan oleh adanya penguasaan sejumlah kecil orang terhadap sejumlah besar lainnya.

b. Konflik Ekonomi

Konflik ekonomi terjadi karena dalam masyarakat terjadi perbutan barang atau jasa yang bersifat ekonomis. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang mengalami peningkatan/pertumbuhan penduduk semakin tinggi namun sumber daya yang ada terbatas.

c. Konflik Sosial

Konflik sosial terjadi akibat tidak sesuainya kepentingan/kebutuhan antara penduduk setempat dengan penduduk pendatang.

d. Konflik Budaya

Konflik budaya terjadi dan berhubungan dengan perbedaan nilai dan norma yang berhubungan dengan benar dan salah serta baik dan buruk.

5. Penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik (*konflik resolution*) merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik. Konflik berhasil diselesaikan jika tercapai konsensus antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang semula bertikai dikatakan berhasil dalam menyelesaikan konflik jika terjadi kesepakatan untuk tidak melanjutkan perbedaan pandangan dan menemukan titik temu dari perbedaan pendapat/pandangan yang sebelumnya bertentangan.

Penyelesaian konflik berguna untuk mencegah beberapa hal berikut ini:

- a. Semakin mendalamnya konflik, yang berarti bahwa semakin tajamnya perbedaan antara pihak yang berkonflik

- b. Semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang terlibat konflik (Maswadi Rauf, 2001: 9)

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan maupun kebijakan publik sangat luas, karena mencakup berbagai bidang pembangunan sebuah negara seperti bidang pariwisata, transportasi, pendidikan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pendapat William N. Dunn sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafie (2006: 106) yang memberikan pengertian kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat.

C. Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Sebagaimana bunyi Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan pengaturan penyelenggaraan kepariwisataaan untuk memberikan jaminan kepastian kewajiban, hak, dan taat cara pengelolaan pariwisata. Menurut Peraturan Daerah tersebut, penyelenggaraan kepariwisataaan bertujuan untuk:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. mengurangi kemiskinan;
4. mengatasi pengangguran;
5. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. memajukan kebudayaan;
7. mengangkat citra bangsa;
8. memupuk rasa cinta tanah air;
9. memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa;
10. mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama; dan
11. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata daerah.

D. Tinjauan Tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang, yang juga melingkupi pelayanan dan produk hasil industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan (Muljadi: 2009: 7). Pendapat lain yang dikemukakan Ismiati (2010:1) memberikan pengertian bahwa pariwisata merupakan kegiatan dinamis yang melibatkan segala sesuatu yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha. Berdasarkan beberapa definisi diatas, secara umum pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan.

2. Pentingnya Pariwisata

Menurut pendapat Harry G. Clement sebagaimana disunting oleh Oka A. Yoeti (2008: 25) yang pada intinya jika pemerintah tidak mendukung pengembangan pariwisata, maka keseluruhan perekonomian akan menderita. Pentingnya pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan perikonomian, akibat dibangunnya prasarana dan sarana demi pengembangan wisata;
- b. Meningkatkan industri baru yang berkaitan dengan pariwisata, baik hotel, transportasi, akomodasi dan lain-lain;
- c. Meningkatkan hasil pertanian, peternakan untuk kepentingan hotel dan restoran dan lain-lain;
- d. Meningkatkan permintaan: *Handicraft, Souvenir, Goods, Art Painting*, dan lain-lain;
- e. Meningkatkan perolehan devisa negara;
- f. Membangun daerah-daerah terpencil yang lama tidak disentuh pembangunan, mempercepat perputaran perekonomian dan lain-lain.

3. Dampak pariwisata

Berikut ini adalah dampak positif dan negatif pengembangan pariwisata sebagaimana dikemukakan oleh Oka A. Yoeti (2008:20-21) yakni:

- a. Dampak Positif:
 - 1) Menciptakan kesempatan usaha;
 - 2) Meningkatkan kesempatan kerja;
 - 3) Meningkatkan pendapatan, mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat,
 - 4) Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - 5) Meningkatkan pendapatan nasional atau *Gross Domestic Bruto (GDB)*;
 - 6) Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya;
 - 7) Meperkuat neraca pembayaran.
- b. Dampak negatif pariwisata:
 - 1) Harga tanah menjadi mahal, terjadi pengkavelingan sehingga terjadi spekulasi harga ;
 - 2) Peningkatan harga-harga bahan makan dipusat-pusat konsentrasi kegiatan pariwisata, berakibat pada inflasi tiap tahunnya;
 - 3) Terjadi kesurakan hayati, yang menyebabkan Indonesia kehilangan daya tarik dalam jangka waktu panjang;
 - 4) Ramainya lalu lintas wisatawan, yang memungkinkan ditumpangi oleh penyelundupan obat bius dan narkotika.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Penentuan Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2010: 299). 124). Pertimbangan yang digunakan peneliti dalam penentuan subjek penelitian adalah: subjek penelitian terlibat dalam konflik pengelolaan Obyek wisata Gua Pindul; mengetahui tahapan-tahapan konflik pengelolaan Obyek Wisata Gua Pindul; mengetahui tentang Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata

Gua Pindul dan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan April sampai dengan Juni 2014.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi, yaitu:

1. Wawancara.

Wawancara dilakukan dengan wawancara terbuka dengan berpedoman pada pedoman wawancara, agar apa yang ditanyakan kepada terwawancara tidak melenceng dari tujuan penelitian.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah setiap bahan-bahan tertulis, yang kemudian didukung dengan kajian pustaka berupa buku-buku maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji validitas penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *cross check* data dengan membandingkan dan mengecek balik data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi seperti melakukan *cross check* data yang didapat dari wawancara Pemerintah Daerah dan wawancara dengan pihak penyedia jasa Pariwisata obyek wisata Goa Pindul, serta warga yang mengklaim kepemilikan tanah di atas Goa Pindul.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti proses analisis dari pendapat Miles dan Huberman (2009:20), yaitu:

1. Reduksi data

Proses reduksi data ini diawali dengan mengidentifikasi satuan (unit) untuk menemukan bagian terkecil dalam data yang memiliki makna

bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Selanjutnya, membuat koding atau kode agar data tetap dapat ditelusuri.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif, yang juga akan dilengkapi dengan tabel maupun grafik.

3. Menyusun hipotesa kerja/kesimpulan

Tahap ini dilakukan dengan merumuskan suatu pernyataan yang proporsional. Tahap ini biasa dikenal dengan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan induktif, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan atas data berupa fakta-fakta yang selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

1. Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Konflik pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul berawal dari keberhasilan pengelolaan Goa Pindul yang dirintis oleh Subagyo bersama beberapa temannya hingga pesona Goa Pindul banyak digandrungi dan menarik perhatian para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Tahun 2013, jumlah pengunjung obyek wisata Goa Pindul mencapai jumlah 72.021 orang, dan pada tahun-tahun berikutnya jumlah pengunjung meningkat hingga mencapai 126.395 orang dengan pendapatan kotor Rp 4,6 (empat koma enam) miliar.

Angka yang cukup fantastis yang dihasilkan oleh ketiga sekretariat pengelola obyek wisata Goa Pindul, yaitu Dewa Bejo, Panca Wisata, dan Wira Wisata, menjadikan Goa Pindul menjadi incaran semua orang tergiur untuk mengelola obyek wisata Goa

Pindul yang akhirnya berujung pada konflik. Konflik tersebut mengakibatkan situasi dan kondisi dalam kehidupan masyarakat khususnya Desa Bejiharjo menjadi kacau karena tidak adanya ketertiban. Definisi konflik tersebut selaras dengan pendapat Suharno (2011: 14-15) bahwa suatu konflik yang muncul akan berakibat pada kekacauan dalam masyarakat. Para pihak yang saling klaim, berselisih, bersengketa, bermusuhan dari yang sifatnya ancaman kekerasan sampai kepada kekerasan fisik.

Konflik yang muncul berawal dari ketidaksepahaman status tanah dan kesenjangan sosial tersebut seiring berjalannya waktu semakin menyeret banyak pihak untuk terlibat di dalamnya. Masing-masing pihak yang berkonflik akan mencari pendukung untuk menguatkan posisinya. Meluasnya konflik Goa Pindul yang menyeret banyak pihak sesuai dengan pendapat Saparudin (2006: 27) bahwa konflik pribadi akan dengan mudah berubah menjadi konflik kelompok karena adanya kecenderungan yang besar dari individu yang berkonflik untuk melibatkan kelompok. Sebab-sebab konflik seperti ini oleh Saparudin diidentifikasi sebagai sebab kolektif.

Kekecewaan Atiek juga muncul terhadap Pemerintah Desa Bejiharjo dengan mempersoalkan kebijakan pemerintah desa yang tidak melibatkan dirinya dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Akibatnya, Atiek juga tidak mendapatkan pembagian hasil dari pengelolaan goa di bawah tanah yang miliknya.

2. Upaya Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

Upaya penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat konflik adalah sebagai berikut:

1) Upaya persuasif

Upaya ini dilakukan dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang terlibat konflik dalam upaya penyelesaian konflik pengelolaan Goa Pindul, namun cara persuasif tidak pernah berjalan secara efektif karena salah satu pihak terpengaruh pada orientasi bisnis.

2) Pengajuan Gugatan ke Kepolisian

Gugatan pertama diajukan oleh Atiek ke Polda DIY pada akhir Februari 2013. Laporan ditujukan kepada 3 (tiga) kelompok masyarakat pengelola Goa Pindul, yaitu Dew Bejo, Panca Wisata, dan Wira Wisata atas dugaan pengrusakan dan penyerobotan tanah di kawasan obyek wisata Goa Pindul. Hasil Gelar Perkara atas laporan tersebut, pasal yang dilaporkan oleh Atiek yaitu penyerobotan atau menempati tanah tanpa izin dan unsur perusakan tidak terpenuhi.

Gugatan kedua, diajukan oleh Atiek kepada Polres Gunungkidul dengan Laporan/Pengaduan Nomor LP/16/II/2014/DIY/RES GNK, tanggal 12 Februari 2014. Gugatan diajukan kepada 3 (tiga) pengelola obyek wisata Goa Pindul dan melibatkan pemerintah setempat, yaitu Bupati Gunungkidul Ibu Badingah, S.Sos, Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi, MH dan sekda Ir. Budi Martono dengan laporan bahwa terlapor telah melakukan pengusahaan sumber daya air tanpa izin dari pihak yang berwenang. Namun demikian, laporan tersebut dihentikan karena asas hukum tanah berlaku horizontal, yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan yang ada di atasnya, sehingga kekayaan yang ada di bawah/ di dalamnya tidak bisa diklaim sebagai hak milik pribadi.

3) Pembuatan Surat Pernyataan

Upaya ini diambil oleh para pihak berawal dari tindakan Atiek Damayanti dan Edi Purwanto selaku pihak yang disertai kepercayaan oleh Atiek untuk mengelola Goa Pindul melalui pendirian Pokdarwis Taruna Wisata menutup Goa Pindul secara paksa. Aksi tersebut dilakukan dengan menutup jalan di pertigaan jalan lingkar utara Wonosari-Grogol yang menuju Desa Bejiharjo. Edi dan kelompoknya juga memasang pagar besi di mulut goa dan memasang spanduk informasi penutupan goa.

Penutupan Goa Pindul tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan pengelola maupun warga Desa Bejiharjo, sehingga memicu kemarahan warga. Warga menuntut agar Edi membuka besi penutup pintu masuk goa. Akhirnya, pagar besi di pintu masuk goa dan spanduk informasi penutupan juga berhasil dilepas. Tidak hanya itu, warga juga mendesak Edi dan kelompoknya agar membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

4) Deklarasi Damai

Deklarasi damai atas konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dilakukan di Balai Desa Bejiharjo. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Gunungkidul dan muspida beserta beberapa jajaran pemkab dan warga Desa Bejiharjo. Kegiatan ini ditujukan untuk mendukung Desa Bejiharjo sebagai desa wisata. Menjaga seluruh elemen masyarakat Desa Bejiharjo untuk berperan aktif menjaga kerukunan, kedamaian dengan mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan demi terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif.

5) Mediasi

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian konflik dengan mendatangkan mediator sebagai pihak ketiga. Upaya mediasi dilakukan pada saat Edi dan kelompoknya melakukan

aksi penutupan goa dan dituntut oleh warga untuk membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Mediasi dilakukan oleh TNI, Polri, Muspika Kecamatan Karangmojo, dan Pemkab Gunungkidul. Setelah mediasi, akhirnya tuntutan warga dipenuhi oleh Edi dan kelompoknya.

Upaya mediasi juga pernah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik Goa Pindul. Namun upaya ini ditolak oleh Atiek karena permohonan izin HO belum juga diterbitkan oleh pemerintah.

- 6) Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata
 Pengundangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata ini sangat dinanti oleh seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul. Meskipun pemerintah terlihat lambat dalam merespon konflik dan menentukan suatu kebijakan, namun dengan adanya payung hukum yang jelas, maka konflik Goa Pindul akan dapat segera diselesaikan.

- 7) Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunungkidul sebagai Pengelola Obyek Wisata Goa Pindul

Munculnya konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang semakin berlarut yang tidak menemukan titik temu diantara pihak yang berkonflik, akhirnya Bupati Gunungkidul menerbitkan Keputusan Nomor 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai Pengelola Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi Kawasan Goa Pindul. Pemerintah daerah menganggap perlu adanya pengelolaan obyek wisata Goa Pindul oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan aspek kelestarian alam, pemberdayaan

masyarakat dan perlindungan segenap pemangku kepentingan di kawasan Goa Pindul.

- 8) Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dewa Bejo
Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 016A/KPTS/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul mengukuhkan terbentuknya Pokdarwis Dewa Bejo yang berkedudukan di destinasi wisata susur sungai bawah tanah Goa Pindul.

- 9) Penetapan Retribusi Masuk Obyek Wisata Goa Pindul
Pengelolaan retribusi masuk obyek wisata Goa Pindul sempat memicu konflik yang cukup serius. Pasalnya, melalui retribusi inilah masyarakat dan pemerintah akan memperoleh pendapatan. Oleh karenan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul mengundang Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2013 atas perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

3. Upaya Penyelesaian Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul Tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata memuat ketentuan-ketentuan tentang penyelenggaraan kepariwisataan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pengusaha usaha pariwisata. Melalui pengundangan perda tersebut, konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul akan mendapatkan titik temu mengenai pihak yang berhak melakukan pengelolaan yang selama ini menjadi klaim dari pihak berkonflik.

Perubahan yang jelas terlihat kasat mata dalam kehidupan masyarakat tersebut merupakan jawaban dari ketentuan dari Pasal 2 Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai berikut:

1) Penetapan Desa Wisata

Pada Agustus 2011 diresmikan Desa Wisata Bejiharjo dengan Goa Pindul yang dijadikan sebagai icon (wawancara dengan Kepala Desa Bejiharjo). Desa Bejiharjo telah memenuhi beberapa persyaratan dalam penetapan desa wisata sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Pertama, memiliki potensi dan daya tarik wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya dalam satu kawasan tertentu yang terintegrasi. *Kedua*, didukung atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang telah dilembagakan. *Ketiga*, dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Goa Pindul diusahakan dan dikelola oleh Pemerintah Desa Bejiharjo bersama masyarakat melalui pembentukan kelompok sadar wisata.

2) Pembangunan Kepariwisata

Pembangunan kepariwisataan obyek wisata Goa Pindul berdasarkan jenisnya, menurut Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata digolongkan sebagai jenis destinasi pariwisata. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata tentang

Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Goa Pindul diresmikan sebagai objek wisata alam oleh Almarhum Sumpeno Putro, mantan Bupati Gunungkidul, pada tanggal 10 Oktober 2010 bertepatan dengan *fam tour* pejabat Kabupaten Gunungkidul.

3) Pengelola Obyek Wisata Goa Pindul

Obyek wisata Goa Pindul merupakan pengembangan daya tarik wisata alam berupa goa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Desa Bejiharjo, dan masyarakat. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, bahwa pengembangan daya tarik wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat.

Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana. Dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul. Pengembangan daya tarik wisata oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bejiharjo, dan pengembangan daya tarik wisata oleh masyarakat bersama pemerintah desa dengan izin dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 016 A/KPTD/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Bawa Bejo Desa Bejiharjo yang berkedudukan di destinasi wisata susur sungai bawah tanah Goa Pindul Desa Bejiharjo, maka jelas pokdarwis yang mempunyai kekuatan hukum

dalam mengelola obyek wisata Goa Pindul adalah Pokdarwis Dewa Bejo. Kelompok sadar wisata di Desa Wisata Bejiharjo yang terdiri dari Dewa Bejo, Wira Wisata, dan Tunas Wisata dalam melakukan pengelolaan obyek wisata Goa Pindul melakukan kerjasama dengan manajemen masing-masing dari pokdarwis.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan memuat ketentuan bahwa setiap pengusaha pariwisata yang melakukan usaha pariwisata wajib mempunyai Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang diterbitkan oleh Bupati sesuai jenis usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata (Pasal 6 Juklak Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan). Sehingga, apabila Atiek Damayanti yang selama ini mengklaim hak pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yang berada di tanah miliknya ingin ikut serta dalam mengelola, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan tersebut.

Dalam hal klaim atas tanah oleh Atik Damayanti Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 jo PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air, bahwa sungai adalah air permukaan yang mengalir di palung/cekungan tanah yang dikuasai negara, oleh karenanya sungai merupakan kekayaan negara yang mempunyai fungsi sosial. Menurut Fajrul Falaakh dalam tulisannya yang berjudul “Sungai Tak Boleh Dikuasai Pribadi” sebagaimana dimuat dalam Kedaulatan Rakyat, bahwa secara hukum meskipun sebidang tanah sudah menjadi hak milik seseorang, masih mempunyai fungsi sosial. Artinya, apabila benar terbukti secara hukum tanah di Goa

Pindul adalah milik perorangan, tetapi aliran sungai yang ada di bawahnya mempunyai fungsi sosial. Sehingga, aliran sungai tersebut tetap bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak bisa diklaim sebagai milik pribadi.

Dalam penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul tersebut, baik Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul maupun Pemerintah Desa Bejiharjo memberikan solusi bahwa seluruh tanah di atas sungai dan Goa Pindul akan dibeli oleh pemerintah. Ketika seluruh tanah sudah menjadi milik pemerintah, maka status kepemilikan tanah sudah jelas. Dengan demikian, status kepemilikan tanah di atas Goa Pindul tidak akan dipersengketakan maupun diklaim oleh pihak-pihak yang memikul kepentingan atas kesuksesan pengelolaan obyek wisata beromset milyaran rupiah ini. Sehingga obyek wisata Goa Pindul dapat dikelola dengan dikerjasamakan oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Solusi atas konflik pengelolaan Goa Pindul yang diusulkan oleh pemerintah setempat tersebut ditolak oleh Atiek Damayanti yang tidak mau menjual tanah miliknya yang berada di atas Goa Pindul. Penolakan Atiek tersebut dengan alasan bahwa tanah miliknya mempunyai nilai historis dalam keluarganya. Apalagi tanah tersebut dibeli bersama suaminya yang sekarang sudah meninggal dunia.

B. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam Mengatasi Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul

1. Kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul dalam Menyelesaikan Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul
 - a) Banyaknya keterlibatan aktor atau Pihak-pihak dalam konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul karena besaran rupiah yang dihasilkan dari pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul memberikan konsekuensi pada pembagian hasil pengelolaan obyek wisata Goa

Pindul harus transparan dan merata sehingga masyarakat di lingkungan Desa Bejiharjo khususnya dan Kabupaten Gunungkidul umumnya dapat merasakan kesejahteraan.

- b) Belum adanya kesepakatan atas pembebasan tanah diatas Goa Pindul yaitu Atik Damayanti atas status tanah masih menjadi kendala dalam penyelesaian konflik, menyebabkan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dapat diselesaikan namun belum tuntas, sehingga masih meninggalkan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - c) Ketidaksepahaman dalam menafsirkan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata antara masing-masing pihak atau aktor yang terlibat, memberikan gambaran bahwa masih perlu adanya sosialisasi lebih mendalam agar Perda tersebut bermanfaat bagi pihak yang berkonflik dan masyarakat;
 - d) Keterlambatan Kabupaten Gunungkidul dalam melihat potensi Goa Pindul dan memberikan Payung Hukum tentang pengelolaan Goa Pindul, menyebabkan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata tidak mampu secara optimal dalam menyelesaikan konflik pengelolaan Goa Pindul.
2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bejiharjo dalam Menyelesaikan Konflik Pengelolaan Obyek Wisata Goa Pindul
- a) Keterlambatan diundangkannya Perda tersebut menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Desa Bejiharjo dalam menyelesaikan konflik di dalamnya karena tidak ada payung hukum saat itu yang mendasari tindakan yang dapat diambil oleh pemerintah desa. Hal ini menyebabkan *kepasifan* pemerintah desa karena hanya bisa menunggu regulasi dari pemerintah daerah agar tindakan yang diambil oleh pemerintah desa sah secara hukum;
 - b) Masih banyak masyarakat awam yang terlibat dalam konflik maupun yang tidak terlibat dalam konflik yang belum memahami

isi Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Kepariwisata;

- c) Belum adanya kesepahaman, para pelaku usaha pariwisata, pemerintah desa, maupun pemerintah kabupaten tidak mempunyai permasalahan karena sudah ada kesepahaman bahwa Goa Pindul adalah milik pemerintah. Pelaku wisata tetap berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Kendala yang justru menghalangi bersumber dari pihak ketiga, yaitu yang mengklaim atas kepemilikan tanah di atasnya. Pemilik tanah berpersepsi bahwa sungai yang ada di bawah tanah adalah miliknya, sedangkan masyarakat berpersepsi bahwa sungai yang ada di bawah tanah tersebut adalah milik negara.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kendala penyelesaian konflik tersebut adalah:

- a) Berkomitmen untuk melaksanakan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 sebagai payung hukum atas penyelenggaraan kepariwisataan secara optimal agar pelaksanaan kegiatan kepariwisataan selaras dengan tujuan yang akan dicapai;
- b) Memberikan solusi kepada masyarakat agar menjual tanahnya kepada pemerintah, sehingga status kepemilikan tanah di Goa Pindul dan sekitarnya jelas merupakan barang publik yang dapat dikelola oleh masyarakat dan tidak menimbulkan munculnya pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguasai destinasi Goa Pindul.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian Konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul yaitu dengan adanya pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Meskipun pengundangan perda tersebut belum

mampu menyelesaikan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul secara tuntas, namun kehadiran perda tersebut sudah meredam konflik yang muncul dengan upaya:

- a. Memberikan kepastian hukum pihak yang berwenang mengelola obyek wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 016 A/KPTD/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Bewa Bejo, sehingga dalam hal ini Atiek Damayanti tidak berhak mengelola obyek wisata Goa Pindul;
 - b. Memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan izin usaha pariwisata. Apabila Atiek Damayanti ingin ikutserta menjadi pengelola obyek wisata Goa Pindul, maka berkas persyaratan permohonan izin yang belum dipenuhi dapat dilengkapi agar memperoleh izin usaha dari pemerintah setempat.
 - c. Memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk ikutserta dalam mengelola usaha pariwisata melalui kerjasama dengan kelompok sadar wisata di suatu destinasi pariwisata.
2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul maupun Pemerintah Desa Bejiharjo dalam menyelesaikan konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul adalah keterlambatan kehadiran pemerintah daerah melalui pengundangan regulasi kepariwisataan menjadikan kedua pihak ini lemah dan terbatas dalam mengambil tindakan karena tidak ada payung hukum yang mendasarinya. Meluasnya konflik yang semakin banyak melibatkan pihak dalam konflik semakin menghalangi pihak pemerintah untuk mencapai kesepakatan antar pihak berkonflik mengenai status Goa Pindul.

B. Saran

1. Bagi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul
 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan SKPD Pelaksana yang mempunyai fungsi dan tanggungjawab dalam bidang kepariwisataan sebaiknya:
 - a. Membaca situasi dan potensi Sumber Daya Alam yang ada di wilayah Kabupaten Gunungkidul maupun perkembangan masyarakat dan pariwisata, sehingga kemungkinan terjadinya konflik dapat diatasi sejak dini yaitu mendatangi obyek wisata yang baru dibuka dan memastikan obyek wisata tersebut jelas status kepemilikan tanahnya;
 - b. Segera tanggap dan memberikan respon secara cepat dalam mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat melalui pengundangan suatu kebijakan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat merangkul dan memberikan manfaat bagi masyarakat Gunungkidul seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan sebagainya sebagai langkah meminimalkan konflik seperti ini terjadi dikemudian hari;
 - c. Memberikan pembinaan secara optimal kepada para pengusaha usaha pariwisata dan melakukan monitoring secara berkala untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan kepariwisataan.
2. Bagi Pemerintah Desa Bejiharjo:
 - a. Melakukan pendekatan-pendekatan secara optimal kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, khususnya pihak perseorangan agar memahami isi kebijakan pemerintah daerah dan mengimplementasikan kebijakan;
 - b. Memberikan kesempatan yang sama sesuai asas kesetaraan dan kekeluargaan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata kepada seluruh komponen masyarakat untuk turut serta bergabung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- I Nyoman Ngurah Subagia Negara. (2005). *Desa Pakraman dan Konflik sosial dalam Dinamika Masyarakat*. Yogyakarta: Pasca Sarjana UGM.
- Inu Kencana Syafie. (2006). *Pengantar ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Maswadi Rauf. (2001). *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Muljadi.A.J. (2010). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Oka A. Yoeti.(2008). *Ekonomi Pariwisata*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ramlan Surbakti.(2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Saparudin. (2006). *Menejemen Konflik Sosial (Studi Kasus Konflik Warga Bugis dengan Warga Bali di Desa Air Periukan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Bengkulu)*. Tesis. Pasca Sarjana UGM.
- Subando Agus, dkk. (2013). *Fenomena Pengelolaan Publicness Melalui Organisasi Non-Publik (Studi Kasus Pengelolaan Destinasi Wisata Pindul di Tengah Kontestasi Nilai Antara Bisnis Versus Sosial dan Sosial Versus Ototitas Ketika Peran Pemerintah Minimal*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses Dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Yumi, Endang Dwi, & Hendrik Koedoeboen. (2012). *Pengelolaan Konflik Sumber Daya Hutan*. Jakarta: Kementerian Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 316/KPTS/2013 tentang Penunjukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Pengelola Obyek Wisata dan Tempat Rekreasi Kawasan Goa Pindul.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul Nomor 016A/KPTS/2015 tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata Dewa Bejo Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, Perubahan Tarif Masuk Obyek Wisata Pantai dan Penambahan Lokasi Obyek Pungutan Retribusi.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Air.